

FAKTOR-FAKTOR PEMBENTUK TERITORIALITAS DI PERMUKIMAN KAMPUNG JAWA-KOTA DENPASAR

Oleh:

Ni Ketut Ayu Intan Putri Mentari Indriani
Dosen pada Prodi Arsitektur Fakultas Teknik, UNTB

Abstrak: Saat ini Kampung Jawa merupakan salah satu permukiman padat penduduk yang terdapat di Kota Denpasar. Penduduk yang tinggal di wilayah ini dulunya merupakan pendatang yang kemudian diberikan lahan oleh Raja Pemecutan. Seiring dengan perkembangan penduduk asli di wilayah tersebut dan juga bertambahnya pendatang, tentu kebutuhan ruang juga semakin tinggi. Hal tersebut mengakibatkan penduduk setempat melakukan ekspansi-ekspansi ruang terutama terhadap ruang yang ada di sekelilingnya. Fenomena ini dalam ranah arsitektur disebut dengan teritorialitas. Secara teori, teritorialitas adalah sesuatu yang berkaitan dengan ruang fisik, tanda, kepemilikan, pertahanan, penggunaan yang eksklusif, personalisasi dan identitas (Edney dalam Laurens, 2004:124). Melihat adanya fenomena teritorialitas yang terjadi di Kampung Jawa, maka peneliti melakukan penelitian ini dengan bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor pembentuk teritorialitas yang dilakukan oleh penduduk Kampung Jawa. Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2016 hingga Februari 2017. Metode penelitian dilakukan dengan cara melakukan observasi lapangan dan wawancara terhadap pihak terkait. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari penelitian ini didapatkan bahwa dasar perilaku teritorial, luas dan ketersediaan lahan, waktu, kapasitas psikologi, serta pengalaman keruangan merupakan faktor-faktor pembentuk dari teritorialitas yang dilakukan oleh penduduk setempat. Selain itu juga ditemukan adanya keanekaragaman teritorialitas di lingkungan permukiman yang disebabkan oleh faktor personal, faktor situasional, faktor estetika, faktor ketidaksengajaan atau keinginan untuk memiliki dan faktor kedekatan individu atau kelompok pengguna.

Kata-kunci: faktor pembentuk, Kampung Jawa, teritorialitas

PENDAHULUAN

Kampung Jawa merupakan permukiman masyarakat muslim yang sudah ada sejak tahun 1890-an dan saat ini menjadi salah satu permukiman padat penduduk di Kota Denpasar. Dengan jumlah penduduk sebanyak 5445 jiwa (Sensus Penduduk tahun 2015) memiliki dampak signifikan pada kepadatan bangunan di lingkungan permukiman. Berdasarkan fakta lapangan, kondisi tersebut tidak diimbangi dengan penataan yang baik, dan luas lahan juga menjadi masalah yang cukup rumit untuk diselesaikan. Dengan tidak adanya pengaturan dan pengendalian yang baik menjadikan lingkungan kampung cenderung kumuh, tidak teratur, tidak nyaman dan kurang sehat. Letak rumah-rumah warga antara satu dengan yang lainnya berjarak sangat rapat, sehingga menyebabkan warga harus berbagi ruang dalam beraktivitas, dan hal ini terjadi hampir di seluruh wilayah permukiman. Tekanan lingkungan yang tinggi ini membuat warga termotivasi secara spasial dengan menciptakan “ruang-ruang baru” guna memenuhi kebutuhannya masing-masing.

Dalam ranah arsitektur, proses ini disebut dengan teritorialitas. Teritorialitas berasal dari kata teritori. Hall (1971) mengungkapkan bahwa teritori merupakan suatu daerah yang dikuasai, yang ditampilkan dalam perilaku khas oleh suatu organisme guna mempertahankan diri dari serangan anggota spesies lainnya. Pada intinya, teritori adalah satu area yang dimiliki dan dipertahankan, baik secara fisik maupun non-fisik. Sedangkan menurut Edney (dalam Laurens, 2004: 124) teritorialitas adalah sesuatu yang berkaitan dengan ruang fisik, tanda, kepemilikan, pertahanan, penggunaan yang eksklusif, personalisasi dan identitas. Diambil berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti mengartikan teritorialitas sebagai upaya klaim dan penguasaan lahan/wilayah yang lebih luas oleh penghuni permukiman, guna mengakomodasi aktivitas sehari-hari baik secara personal maupun berkelompok untuk fungsi-fungsi tertentu dengan berbagai upaya kontrol dan pengawasan. Kontrol dapat diartikan sebagai sebuah pengaturan batas antara individu yang satu dengan yang lainnya

dengan penandaan atau personalisasi untuk menyatakan bahwa wilayah tersebut ada yang memiliki. yang nantinya akan digambarkan sesuai dengan jenis, pembatas, pola ruang dan klasifikasinya kemudian divisualisasikan dalam pemetaan zona dan denah ruang.

Kepemilikan dalam teritorialitas menurut Fisher (1984) ditentukan oleh persepsi orang yang bersangkutan, sementara Edney (1974) mengungkapkan bahwa teritorialitas sebagai sesuatu yang berkaitan dengan pertahanan, tanda, kepemilikan. Terbentuknya suatu ruang teritori tidak dapat terlepas dari elemen penanda/pembatas sebagai bentuk pertahanan dan meminimalisir berbagai bentuk pelanggaran teritori. Wujud elemen penanda teritori tersebut beragam sesuai dengan kondisi di lapangan. Elemen penanda teritori yang dimaksud disini secara umum dapat dikelompokkan ke dalam batas-batas yang membentuk ruang itu sendiri, yaitu antara lain batas *fix element*, *semi fixed element*, maupun batas ruang *non-fixed element* (Altman, 1980). Elemen *fix* merupakan elemen-elemen tetap seperti bangunan, sementara *semi fixed*, merupakan elemen-elemen agak tetap seperti elemen jalan, tanda iklan, etalase toko dan elemen-elemen urban lainnya. Sementara elemen *non fixed* adalah *non environmental element* yang merupakan elemen diluar elemen-elemen fisik. Elemen *non fixed* berhubungan langsung dengan tingkah laku atau perilaku manusia yang dianggap selalu tidak tetap.

Pada lokasi penelitian, perilaku spasial warga permukiman Kampung Jawa ditandai dengan adanya upaya klaim terhadap lahan yang ada disekitar rumahnya, baik lahan sisa di antara bangunan rumah maupun lahan kosong di sekitar bantaran sungai maupun ruang-ruang publik demi mengakomodasi kepentingan mereka, secara individu maupun kelompok. Perilaku spasial ini merupakan hasil dari rangkaian proses individual, sebagai sebuah respon seseorang yang muncul saat terjadi interaksi antara manusia dengan lingkungan fisiknya. Dalam proses ini, masalah-masalah yang berkaitan dengan lingkungan fisik akan memotivasi terjadinya perilaku spasial individu guna mengatasi semua permasalahan tersebut.

Penelitian ini akan menunjukkan teritorialitas yang terjadi di lingkungan warga Kampung Jawa, yang akhirnya dapat menunjukkan apa saja faktor-faktor pembentuk teritorialitas tersebut. Fakta ini menarik untuk dikaji karena peneliti dapat mengetahui bagaimana warga di lingkungan permukiman Kampung Jawa menciptakan ruang teritori baru, apa saja fungsi-fungsi ruang dari teritori baru yang mereka ciptakan, dan faktor-faktor yang berpengaruh dalam pembentukan teritori di permukiman tersebut.

METODE

Lokasi penelitian terdapat di lingkungan RT 1, RT 3, RT 6 dan 7, Kampung Jawa (Dusun Wanasari), Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan November 2016 – Februari 2017.

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu (Bungin, 2007:68).

METODE PENGUMPULAN DATA

Tahapan awal pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan melakukan observasi. Observasi pertama adalah *grand tour observation*/observasi deskriptif merupakan observasi awal untuk mengetahui gambaran umum permukiman di kawasan objek studi, kedua adalah observasi terfokus, pada observasi ini pengamatan mulai difokuskan pada masalah yang diteliti yaitu pada fenomena penggunaan ruang publik oleh warga setempat, pada tahap ini dilakukan pendataan kemudian penggambaran/visualisasi yang terbentuk.

Selain observasi, pengumpulan data diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam pada pihak-pihak yang berkompeten dan terkait dengan penelitian yang dilakukan untuk memperkuat data-data lapangan (*purposive sampling*), seperti instansi pemerintahan, pemilik lahan, maupun pihak-pihak lainnya yang berhubungan dengan masyarakat permukiman Kampung Jawa.

Metode Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagian besar adalah menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini diarahkan pada uraian deskriptif mengenai bagaimana perilaku masyarakat terkait hubungannya dengan kondisi lingkungan permukiman dalam memanfaatkan ruang publik sebagai pemenuh kebutuhan ruangnya sehari-hari.

Data-data berupa gambar (foto, sketsa, peta) juga diinterpretasikan ke dalam bentuk peta tematik, sehingga mempermudah dalam menganalisis.

Kemudian data yang dihasilkan akan diuji kembali keabsahannya berdasarkan validitas dan reliabilitasnya dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi data, yaitu melakukan penyusunan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, kemudian ditentukan data atau informasi yang sesuai

dengan fokus penelitian, sementara data yang kurang relevan dikesampingkan.

2. Pengklasifikasian data dalam beberapa titik tekan pada persoalan penelitian. Pada tahap inilah pendekatan-pendekatan teori digunakan untuk memahami, meneliti maupun menganalisis fokus penelitian.
3. Kesimpulan, merupakan tahap akhir dari teknik analisis data yang diperoleh dari klasifikasi data yang didapat, dan kemudian dibuat kesimpulan dari keseluruhan hasil analisisnya

DISKUSI

Perilaku teritorial umumnya didasari oleh motivasi dan kebutuhan/kepentingan yang meliputi pengaturan, penempatan ruang, kontrol penuh atas ruang, pemikiran, kepercayaan, dan perasaan untuk mempertahankan. Sesuai dengan pengantar pada jurnal, pembentukan awal teritori penghuni di permukiman Kampung Jawa didasari oleh adanya tekanan lingkungan dan kebutuhan terhadap hunian layak huni, yang mampu mengakomodasi seluruh aktivitas penghuni rumah. Hal tersebut kemudian memicu terjadinya proses individual dan proses sosial yang berdampak pada perilaku keruangan warga permukiman. Tiap individu biasanya mempunyai perbedaan perilaku keruangan, perbedaan kebutuhan dan kepentingan akan membentuk teritorialitas yang berbeda pula.

Perbedaan dasar dari perilaku teritorial masyarakat ini kemudian memicu terjadinya klaim atas ruang publik atau ruang-ruang sisa di sekitar permukiman yang berpotensi untuk dikuasai. Keinginan dari penghuni untuk memiliki cukup ruang untuk memwadhahi seluruh kebutuhan dan aktivitasnya memicu terjadinya perkembangan teritori rumah di luar batas teritori legal yang telah dimiliki penghuni.

Sebenarnya, klaim atas ruang merupakan bagian dari hak manusia dalam penggunaan ruang apabila berada pada area yang merupakan hak dari pelaku klaim. Klaim ruang dapat dimaknai sebagai gabungan dari hak akses dan kebebasan bertindak laku dalam menyatakan kepemilikan terhadap suatu ruang. Klaim atas ruang dapat dipicu oleh keinginan pribadi maupun untuk kepentingan kelompok.

Pada kasus di lapangan, klaim terhadap ruang yang dilakukan penghuni dapat mengganggu kebebasan penghuni permukiman lain, khususnya pada area-area sirkulasi publik yang rawan terjadi klaim ruang oleh warga.

Berdasarkan hal tersebut, perilaku teritorial penghuni permukiman Kampung Jawa dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram Perilaku Teritorial
Sumber: Observasi Lapangan

Pada Gambar 1 dapat dilihat bahwa perilaku teritorial didasari oleh adanya keinginan dan kebutuhan warga terhadap ruang baik untuk kepentingan individu atau kelompok. Idealnya, antara kebutuhan dan keinginan haruslah seimbang untuk membentuk perilaku teritorial yang tidak saling merugikan.

Dikatakan dapat merugikan apabila perilaku teritorial yang dilakukan warga sampai tidak terkontrol dan dapat mengganggu warga lainnya. Misalnya klaim terhadap ruang publik yang berlebihan dapat mengganggu sirkulasi ruang yang ada dipemukiman. Meskipun tidak memicu konflik yang berarti, namun hal tersebut bukanlah sesuatu yang dapat dibenarkan.

Pembentukan teritori di Kampung Jawa sangat dipengaruhi luas lahan yang dimiliki masing-masing penghuni. Semakin sedikit lahan yang dimiliki oleh warga, semakin banyak kemungkinan penghuni untuk melakukan ekspansi teritorial. Meskipun begitu, ketersediaan lahan potensial di sekitar rumah penghunijuga menjadi pemicu terjadinya ekspansi tersebut. Misalnya, warga yang rumahnya berada tepat di bantaran sungai memiliki kesempatan untuk melakukan ekspansi yang lebih besar dibanding warga yang berada di tengah-tengah permukiman. Hal ini dikarenakan lahan terbuka di bantaran sungai jauh lebih banyak di banding lahan yang ada di tengah permukiman.

Hal ini menunjukkan bahwa selain kebutuhan, ada unsur keinginan yang mendasari penghuni untuk melakukan monopoli terhadap lahan-lahan yang bukan merupakan teritori legalnya. Dengan kata lain, jika lahan berpotensi untuk di klaim ada, maka keinginan untuk menguasainya akan muncul begitu saja.

Fenomena teritorialitas di Kampung Jawa juga terbentuk karena dipengaruhi faktor waktu. Pada waktu-waktu tertentu terjadi perluasan area teritorial untuk kepentingan bersama sebagai ruang interaksi dan bersosialisasi. Misalnya salah satu pekarangan rumah warga kerap dipinjam ketika terjadi pertemuan antar warga karena daya tampung mushola terkadang tidak mencukupi.

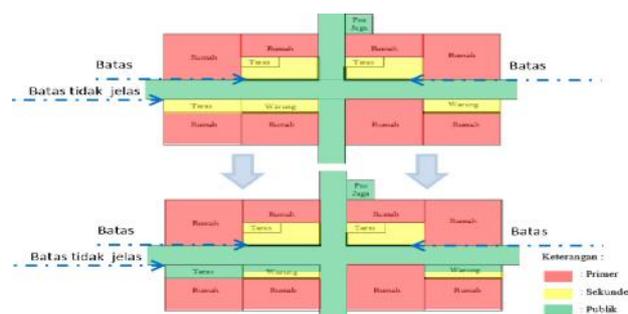
Kasus lainnya adalah ketika terjadi aktivitas berkumpul di sore hari oleh ibu-ibu di permukiman, selain warung, teras rumah warga yang tidak memiliki pagar pembatas kerap menjadi “ruang bersama” untuk ibu-ibu tersebut berkumpul dan berbincang (Gambar 2).



Gambar 2. Teritorialitas Berdasarkan Faktor Waktu
Sumber: Observasi Lapangan

Ruang bersama pada umumnya merupakan ruang publik yang pada saat tertentu menjadi ruang bersama, dengan memenuhi setting dan atribut ruang tertentu. Namun pada kasus di lapangan, lingkungan rumah terkadang juga menjadi ruang bersama dalam lingkungan permukiman. Hasil pengamatan didapatkan bahwa ruang bersama dapat terbentuk di permukiman Kampung Jawa selama ruang tersebut memiliki setting atau latar ruang yang meliputi; adanya kemudahan akses (aksesibilitas), adanya fasilitas yang dapat dipakai bersama (naungan), adanya teduhan yang berupa vegetasi atau bayang-bayang massa bangunan, adanya kelapangan tempat/keterbukaan ruang, adanya kenyamanan, dan adanya kebebasan secara batasan fisik atau tidak ada penyekat.

Elemen pembentuk ruang bersama di lingkungan permukiman terbagi menjadi tiga, yaitu *fix element*, *semi fixed element*, dan *non fixed element*. *Fix element* bersifat tetap sehingga baik ada atau tidaknya aktivitas elemen tersebut tetap ada dalam ruang. *Semi fixed element* dan *non fixed element* biasanya selalu mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan aktivitas.



Gambar 3. Analogi Perluasan Zona Teritori Untuk Ruang Bersama
Sumber: Analisis Pribadi

Gambar 3 menunjukkan gambaran pemetaan teritorial ruang bersama di lingkungan permukiman. Saat waktu-waktu tertentu, ketika terjadi aktivitas berkumpul, berbincang dan bersosialisasi antar warga, terjadi beberapa perluasan zona publik di beberapa ruang tertentu.

Teras yang tidak memiliki penanda teritori yang jelas akan berubah menjadi ruang publik saat terjadi aktivitas tersebut. Begitu juga yang terjadi dengan warung, sebagian ruang dalam warung akan menjadi ruang publik bagi warga yang berbelanja dan bercengkrama. Warung biasanya tidak mengalami perubahan secara menyeluruh karena sebagian besar memanfaatkan jalan lingkungan sebagai ruang bersosialisasi dengan memberikan batas-batas *semi fixed element* seperti bangku atau kursi.

Selain fenomena teritorialitas tersebut, waktu juga mempengaruhi perilaku teritorial warga permukiman. Misalnya, warga yang telah lama tinggal di permukiman cenderung leluasa melakukan klaim ruang yang lebih besar dibanding penghuni yang baru tinggal beberapa tahun.

Masyarakat Kampung Jawa memiliki ikatan sosial yang kuat, hal ini terbukti dari tingginya rasa solidaritas, toleransi dan tenggang rasa antar warga yang satu dan warga yang lainnya. Pada kelompok masyarakat golongan sosial ekonomi yang lebih rendah terutama pada permukiman dengan lahan sewaan, banyak ditemukan adanya pelanggaran teritorialitas dan fenomena warga yang saling berbagi teritori. Hal ini didasarkan dari penuturan warga yang sering meminjamkan kamar mandi rumahnya untuk warga lain yang membutuhkan. Mengingat banyak sekali warga Kampung Jawa, di area permukiman khususnya RT 7 yang belum memiliki MCK pribadi (Gambar 4).



Gambar 4. Ruang yang Sering dipinjamkan Penghuni Untuk Warga
Sumber: Observasi Lapangan

Dalam keseharian di permukiman RT 7, Sebagian warga memilih memanfaatkan aliran sungai untuk keperluan sehari-hari, sebagian lagi terpaksa harus meminjam kamar mandi milik warga yang lain. Pada Gambar 4 dapat dilihat salah satu contoh ruang yang memiliki *sharing value* karena pemiliknya mempersilahkan warga lain

untuk menggunakan kamar mandi tersebut asalkan telah meminta ijin sebelumnya.

Dengan demikian, terjadi pergeseran nilai ruang yang mana aktualnya sebuah kamar mandi merupakan zona privat penghuni rumah beralih menjadi zona semi privat. Namun, adanya syarat untuk meminta ijin tersebut merupakan salah satu bentuk kontrol penghuni terhadap teritorialnya, untuk mencegah hal-hal yang dapat mengganggu kenyamanan dalam teritorial penghuni rumah.

Pada kelompok masyarakat level sosial ekonomi yang lebih tinggi dan status kepemilikan lahan adalah milik pribadi, fenomena tersebut masih dapat ditemukan dalam kasus yang berbeda, meskipun tidak sebanyak pada kasus sebelumnya.

Misalnya fenomena teritorialitas warga yang membagi ruang ibadah (mushola) pribadinya untuk warga, seperti yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya.

Selain kasus tersebut, fenomena teritorialitas di Kampung Jawa, baik ekspansi teritorial maupun privatisasi ruang publik tidak pernah menimbulkan konflik berarti di antara warga permukiman. Kedua hal ini merupakan bukti bahwa kapasitas psikologi juga mempengaruhi terbentuknya teritorialitas. Kapasitas psikologi adalah rasa persaudaraan yang kuat, tenggang rasa, toleransi dan rasa ingin berbagi dengan sesama. Masyarakat Kampung Jawa dapat memaknai ruang secara bijak dengan menggunakannya secara rukun demi kepentingan bersama tanpa adanya perselisihan dan konflik antar warga.

Tinggal dalam kondisi fisik lingkungan yang sama secara bertahun-tahun menyebabkan masyarakat Kampung Jawa memiliki pengalaman keruangan yang sama. Hal ini dikarenakan tekanan lingkungan yang dihadapi juga sama, sehingga respon yang diberikan cenderung serupa, yaitu dengan melakukan perilaku spasial atau memberikan respon emosional yang menghasilkan fenomena-fenomena teritorialitas tertentu. Namun, meskipun pengalaman keruangan yang dimiliki sama, perilaku keruangan tiap individu dalam menciptakan teritorialitas bisa berbeda.

Perbedaan perilaku keruangan, perbedaan kebutuhan dan kepentingan dapat memicu teritorialitas yang berbeda dan beragam. Dalam teori, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keanekaragaman teritori antara lain adalah karakteristik personal seseorang, perbedaan situasional dan faktor budaya (Laurens, 2004).

Faktor personal berkaitan dengan kondisi individu tersebut secara personal, baik gender maupun kepribadian. Faktor situasional berkaitan dengan situasi dan kondisi yang mempengaruhi Perilaku teritorial seseorang atau sekelompok orang. Faktor budaya berkaitan dengan latar

belakang budaya yang menjadi dasar Perilaku teritorial yang terbentuk.

Dalam penelitian ini, faktor yang mempengaruhi keragaman teritorialitas hanya difokuskan pada dua faktor utama, yakni faktor personal dan situasional yang dapat dilihat dalam personalisasi dan variasi penanda masing-masing hunian.

Faktor personal di sini lebih ditekankan pada kepribadian masyarakat di lokasi penelitian, sementara faktor situasional berkaitan dengan aspek fisik dan sosial ekonomi masyarakat.

Secara umum wujud teritorialitas ruang yang terbentuk didasarkan pada kepentingan dan kebutuhan masing-masing warga. Temuan di lokasi penelitian menunjukkan pribadi masing-masing warga memiliki tingkat kesadaran teritorialitas yang berbeda-beda. Perbedaan faktor personal warga tersebut mempengaruhi sikap dan perilaku yang bersangkutan dalam memaknai ruang.

Beberapa warga bertahan pada teritorial legal yang dimiliki sementara yang lain berusaha untuk melakukan ekspansi teritorial guna memenuhi kebutuhan ruang tanpa merasa bahwa hal tersebut adalah sebuah pelanggaran (Gambar 5).



Gambar 5. Pembentukan Teritorialitas Berdasarkan Faktor Personal

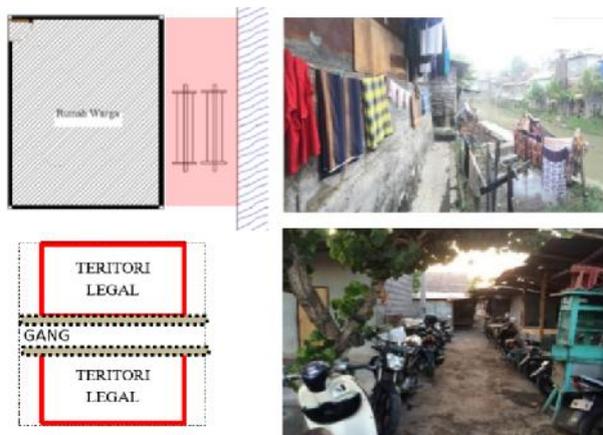
Sumber: Observasi Lapangan

Pada Gambar 5 dapat dilihat bahwa kedua hunian berada di bantaran sungai. Namun dalam Perilaku teritorialnya, gambar pertama memilih untuk menjemur pakaian pada batas sisi teritori legalnya dengan memasang kayu-kayu untuk penyangga pakaian di dinding rumah. Berdasarkan hasil wawancara, apabila dilakukan ekspansi ke tepi sungai, maka jalur gang yang ada akan semakin sempit dan mengganggu warga lainnya sehingga penghuni memilih menjemur pakaiannya hanya pada dinding rumah saja.

Sementara pada gambar kedua, penghuni memilih melakukan ekspansi ke lahan sisa di tepi sungai untuk memasang jemuran pakaian karena dirasa dapat memadai kebutuhan ruang penghuni. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran pribadi

dalam berempati, memilih untuk melakukan pelanggaran teritorialitas atau tidak merupakan faktor personal yang mempengaruhi pembentukan teritorialitas.

Perilaku teritorial juga dipengaruhi oleh faktor situasional masyarakat setempat, salah satunya kondisi fisik lingkungan. Warga yang memiliki rumah tinggal dekat dengan lahan-lahan sisa, lahan publik atau lahan yang berpotensi untuk di "pinjam" cenderung melakukan ekspansi pada area tersebut (Gambar 6). Misalnya lahan sisa di sepanjang bantaran sungai dijadikan area untuk mendirikan tiang-tiang jemuran maupun kandang hewan peliharaan oleh masyarakat yang tinggal dilokasi terdekat



Gambar 6. Teritorialitas Warga di Lokasi Penelitian

Sumber: Observasi Lapangan

Begitu juga dengan warga yang rumahnya berada di lingkungan area bawah dan sulit diakses sehingga menyulitkan kendaraan masuk terpaksa melakukan privatisasi ruang publik dengan memanfaatkan gang bahkan area sekolah untuk parkir kendaraan roda dua. Kondisi tersebut juga memaksa warga yang memiliki kendaraan roda empat untuk parkir di badan jalan raya. Hal ini sesuai dengan teori pengaruh lingkungan terhadap perilaku yang dikemukakan oleh Rapoport (1986), yaitu: *environmental determinism*, *environmental possibilism*, dan *environmental probabilism*.

Dalam *environmental determinism* dikatakan lingkungan menentukan tingkah laku masyarakat di tempat tersebut. Artinya kondisi fisik lingkungan yang kurang kondusif di permukiman Kampung Jawa lah yang memicu adanya upaya penguasaan lahan oleh penghuni pada area-area bukan milik. Apabila kondisi lingkungan di kawasan permukiman menyediakan ruang yang cukup bagi masing-masing warga masyarakat, maka tindakan klaim terhadap ruang yang bukan miliknya tidak lagi diperlukan.

Kemudian *environmental possibilism*, menyatakan bahwa lingkungan fisik dapat

memberikan kesempatan atau hambatan terhadap tingkah laku masyarakat. Maksudnya apabila penghuni memiliki pekarangan yang mencukupi, maka kesempatan untuk menata lingkungan fisik rumahnya dengan baik menjadi lebih besar. Sebaliknya, apabila penghuni tidak memiliki cukup ruang pada area rumahnya, maka kesempatan untuk menata lingkungan fisik rumah menjadi lebih kecil.

Terakhir adalah *environmental probabilism*, yang menyatakan bahwa lingkungan memberikan pilihan-pilihan yang berbeda bagi tingkah laku masyarakat. Seperti pada contoh kasus sebelumnya, meskipun lingkungan fisik permukiman kurang kondusif, namun warga dapat menemukan beragam solusi dan alternatif untuk mengatasi masalah tersebut. Beberapa diantaranya memilih bertahan pada teritori legal. Sebagian lainnya, memilih untuk memanfaatkan ruangruang publik atau lahan sisa di sekitarnya untuk memenuhi kepentingan pribadi.

Selain aspek fisik, faktor situasional yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat juga mempengaruhi perilaku warga dalam membentuk teritorialitas (Gambar 7). Pelanggaran teritorialitas paling banyak dilakukan oleh masyarakat dengan sosial ekonomi lemah.



(1) Rumah warga dengan kondisi sosial ekonomi menengah ke atas



(2) Rumah warga dengan kondisi sosial ekonomi lemah

Gambar 7. Perbandingan Teritorialitas yang Ada di Lokasi Penelitian

Sumber: Observasi Lapangan

Hal tersebut dikarenakan terbatasnya kemampuan warga tersebut untuk mendapatkan rumah tinggal yang lebih layak. Dengan penghasilan yang tidak seberapa, sebagian warga terpaksa tinggal di lahan sewaan dengan rumah petak yang ruangnya terbatas. Jumlah ruang tidak sebanding dengan aktivitas dan civitas yang diwadahi, sehingga memaksa warga untuk melakukan ekspansi teritorial terhadap lahan sisa

maupun ruang publik untuk memenuhi kebutuhan terhadap ruang yang tidak dimiliki.

Kondisi sosial ekonomi juga mempengaruhi perilaku masyarakat dalam melakukan personalisasi dan penandaan terhadap teritorinya. Misalnya warga yang berprofesi sebagai pemulung melakukan personalisasi dan penandaan dengan menggunakan barang-barang hasil memulungnya sebagai sebuah identitas diri (Gambar 8).



Gambar 8. Personalisasi dan Penandaan pada Tingkat Sosial Ekonomi Lemah
Sumber: Observasi Lapangan

Berbeda dengan masyarakat dengan tingkat sosial ekonomi yang lebih baik, pembentukan teritorialitas ruangnya lebih jelas. Masyarakat dengan kondisi seperti ini mampu membangun rumah di atas lahan milik pribadi, memiliki kebebasan dalam menata rumahnya agar lebih layak, memiliki pintu gerbang dan tembok pagar yang masif dengan ruang-ruang yang cukup untuk memenuhi semua kebutuhan penghuni (Gambar 9).

Wilayah teritori dengan pembatas yang tegas merupakan suatu bentuk kontrol teritorialitas, dengan adanya kontrol seperti ini, kemungkinan terjadi invasi dari pihak asing akan lebih sedikit. Tidak ada invasi berarti tidak ada agresi. Pada teritori yang belum terbentuk secara nyata dan jelas, agresi akan lebih sering terjadi.

Pembatas fisik teritorial, terutama pintu dan pagar dikatakan sebagai suatu kontrol akses teritorial terkuat karena mampu membatasi siapa saja yang boleh dan tidak boleh masuk ke dalam suatu zona teritori.



Gambar 9. Personalisasi dan Penandaan pada Tingkat Sosial Ekonomi yang Lebih Baik
Sumber: Observasi Lapangan

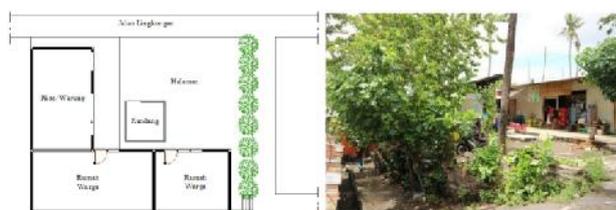
Selain faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya, pembentukan teritorialitas juga dipengaruhi faktor estetika. Pada beberapa kasus, warga melakukan personalisasi dan penandaan dengan menata beberapa tanaman pot yang secara tidak langsung memberikan tanda/batas pada wilayah teritorinya. Perilaku teritorial warga tersebut didasari dari keinginan untuk mempercantik huniannya (Gambar 10).



Gambar 10. Personalisasi dan Penandaan Berdasarkan Faktor Estetika
Sumber: Observasi Lapangan

Sementara pada kasus lainnya, pembentukan teritorialitas dilakukan berdasarkan faktor ketidaksengajaan serta keinginan untuk memiliki peneduh.

Penghuni seolah melakukan personalisasi dan penandaan terhadap teritorinya dengan membuat pagar di sekitar rumah tinggal dengan memanfaatkan tanaman dan bebatuan (Gambar 11). Padahal sesungguhnya, hal tersebut adalah sebuah ketidaksengajaan yang berawal dari banyaknya tanaman liar yang tumbuh di halaman rumah penghuni. Penghuni hanya berusaha merapikan dan membiarkannya tumbuh agar dapat memberikan peneduhan untuk rumahnya.



Gambar 11. Personalisasi dan Penandaan Berdasarkan Faktor Ketidaksengajaan
Sumber: Observasi Lapangan

Beberapa hal yang telah dipaparkan tersebut sesuai dengan teori hubungan perilaku dan lingkungan yang menyatakan bahwa manusia mempunyai keunikan tersendiri, keunikan yang dimiliki setiap individu akan mempengaruhi lingkungan sekitarnya, begitu juga sebaliknya.

Perilaku teritorial juga terbentuk sebagai wujud dari privasi seseorang. Altman (1975) mendefinisikan privasi sebagai proses pengontrolan yang selektif terhadap akses kepada diri sendiri dan orang lain yang dapat dicapai melalui beberapa

mekanisme perilaku, salah satunya adalah teritorialitas.

Dalam proses pembentukan teritorialitas tersebut, umumnya akan timbul perilaku spasial warga berkaitan dengan pemberian batas-batas rumah, penandaan dan personaliasi ruang-ruang atau area yang dianggap atau diklaim sebagai teritori miliknya. Pemberian batas-batas kepemilikan (teritorial) dalam suatu hunian merupakan suatu proses kontrol terhadap privasi penghuni.

Selain itu, diungkapkan juga bahwa terdapat dua jenis privasi, yaitu privasi rendah (pada beberapa kasus, terdapat situasi dimana warga harus berbagi ruang dan berinteraksi dengan orang lain, perilaku interpersonal ini yang memicu adanya ruang personal dan perilaku teritorial) dan privasi tinggi (ada waktu dimana individu ingin menyendiri dan terpisah dari orang lain).

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang mempengaruhi pembentukan teritorialitas di lokasi penelitian adalah beberapa faktor berikut ini, yaitu:

- a) Dasar perilaku teritorial, yaitu kebutuhan dan keinginan sebagai dasar perilaku teritorial. Misalnya kebutuhan untuk beraktivitas, keinginan untuk mendapatkan ruang yang lebih luas, maupun kenyamanan ruang gerak akan menyebabkan terjadinya klaim atas ruang-ruang di luar teritori legal;
- b) Luas dan Ketersediaan lahan, luas lahan yang dimiliki dan ada tidaknya lahan potensial untuk diklaim di sekitar rumah akan mempengaruhi terbentuknya teritorialitas penghuni;
- c) Waktu, lama waktu penghuni tinggal di lokasi penelitian mempengaruhi teritorialitas yang dibentuk. Selain itu, dalam beberapa kasus, teritorialitas hanya terbentuk pada waktu-waktu tertentu dan bersifat tidak tetap;
- d) Kapasitas psikologi, dalam bentuk rasa persaudaraan yang kuat, tenggang rasa, toleransi dan rasa ingin berbagi dengan sesama. Ruang di lingkungan permukiman juga dapat digunakan bersama-sama tanpa konflik yang berarti.
- e) Pengalaman keruangan, meskipun pengalaman keruangan yang dimiliki hampir sama, teritorialitas yang dibentuk bisa berbeda tergantung dari perilaku keruangan tiap individu itu sendiri.

Selain itu, terdapat juga beberapa faktor secara umum yang menyebabkan terjadinya

keanekaragaman teritorialitas di lokasi permukiman, antara lain adalah sebagai berikut:

1. faktor personal, berkaitan dengan karakter dan kepribadian masing-masing individu,
2. faktor situasional, berkaitan dengan kondisi fisik lingkungan, status kepemilikan lahan dan sosial ekonomi masyarakat,
3. faktor estetika,
4. faktor ketidaksengajaan/keinginan untuk memiliki penebuh, dan
5. faktor kedekatan individu/kelompok pengguna.

Berkaitan dengan faktor personal, pembentukan teritorialitas di lokasi penelitian lebih didasarkan pada perbedaan karakter dan kepribadian penghuni. Perbedaan tersebut cenderung mempengaruhi sikap dan perilaku yang bersangkutan dalam memaknai ruang-ruang yang ada disekitarnya. Sebagian warga memilih bertahan dalam teritorial legal yang dimiliki meskipun terbatas. Sementara warga yang lain berusaha untuk melakukan perluasan area dan memanfaatkan lahan disekitarnya guna memenuhi kebutuhan ruang tanpa merasa bahwa hal tersebut adalah sebuah pelanggaran.

Tindakan yang dilakukan warga tersebut tentu saja juga berkaitan dengan faktor situasional yang dialami masing-masing warga. Perbedaan kondisi fisik lingkungan rumah tinggal, status kepemilikan lahan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat menghasilkan perilaku teritorialitas yang berbeda pula. Warga dengan kondisi fisik lingkungan yang kurang kondusif, menempati lahan sewaan dan kondisi sosial ekonomi yang rendah cenderung lebih mudah terdorong untuk melakukan invasi ruang maupun privatisasi ruang publik guna mewadahi aktivitas sehari-hari.

Di luar faktor personal dan situasional, pembentukan teritorialitas ruang juga dipengaruhi oleh faktor estetika dan faktor ketidaksengajaan. Beberapa warga melakukan penataan terhadap rumah tinggalnya dengan tujuan estetika belaka justru berujung pada pembentukan sebuah teritori.

Hal yang sama juga terjadi pada kasus lainnya, dimana warga membentuk teritorialitas ruang tanpa adanya kesadaran teritorialitas itu sendiri. Murni hanya berdasarkan faktor ketidaksengajaan tanpa ada tujuan khusus yang berkaitan dengan upaya personalisasi dan penandaan atau usaha untuk mencapai privasi tertentu dalam wujud teritorial. Selain itu, kedekatan individu/kelompok pengguna juga menjadi faktor yang mempengaruhi pembentukan teritori ruang. Kedekatan hubungan ini menjadi alasan utama warga untuk dapat berbagi ruang ditengah keterbatasan yang dimiliki.

Hal-hal tersebut berimplikasi terhadap kondisi dimana ruang-ruang teritorialitas di pemukiman Kampung Jawa memiliki fleksibilitas yang tinggi, selalu siap berubah bila diperlukan. Dimensi dan

fungsi ruang tidak lagi pasti, menyesuaikan dengan kebutuhan manusia yang dapat memicu perilaku spasial untuk memunculkan ruang-ruang baru. Dari hasil penelitian ini, pemahaman terhadap ruang publik-privat/milik-bukan milik dalam konteks teritorialitas di pemukiman Kampung Jawa juga sangatlah relatif dikarenakan tingginya fleksibilitas ruang yang ada. Hal ini sangat tergantung dari persepsi, kegiatan yang diprioritaskan dan kedekatan hubungan personal antar penghuni.

Sama seperti penelitian lainnya, dalam proses penelitian ini pun memiliki kekurangan dan kelebihan. Beberapa hambatan yang ditemui oleh peneliti adalah tidak semua narasumber dapat bersikap kooperatif, serta susahnyanya memperoleh peta wilayah karena perkampungan tersebut sangat rapat bangunan sehingga tidak ditemukan data pasti pemetaan. Kekurangan lain yaitu penelitian ini hanya berfokus pada kajian teritori, padahal cakupan mengenai sosial budaya terhadap ruang sebenarnya masih banyak yang bisa dikembangkan.

Sedangkan untuk kelebihan penelitian ini adalah belum adanya peneliti yang melakukan penelitian mengenai teritorialitas di wilayah Kampung Jawa. Selain itu, hasil penelitian ini juga bisa dijadikan sebagai masukan untuk perencanaan pengembangan kawasan Kampung Jawa di kemudian hari, misalnya saja dalam hal pengembangan fasilitas atau ruang publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Altman, I. 1975. *The Environment and Social Behavior*. Monterey, CA: Wadsworth.
- Bungin. B. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Edisi pertama, Cetakan ke-2. Jakarta: Kencana
- Burhanuddin. 2009. *Karakteristik Teritorialitas Ruang Pada Permukiman Padat di Perkotaan*. Jurnal "Ruang" Vol 2 No. 1, Edisi Maret 2010.
- Edney, J. 1976. *Human Territoriality: Environmental Psychology, People and Their Physical Setting*. Eds: Prohansky, Harold M. Et.all. Holt. Rinehart and Winston. New York.
- Fisher, J.A., Bell, P.A. & Baum, A. 1984. *Environmental Psychology (2nd ed.)*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Hall, E. 1966. *The Hidden Dimension*. New York: Doubleday.
- Lang, Jon. 1987. *Creating Architectural Belief System and Social Behaviour*. in: Jong Lang et al., eds, *Designing for Human Behaviour, Architecture and Human Sciences*, Strouburg, Pa: Dowden, Hutchinson and Ross.
- Laurens, J. Marcella. 2004. *Arsitektur dan Perilaku Manusia*. Jakarta: Grasindo.
- Moleong. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rapoport, A. 1969. *House Form and Culture*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.